



# ANALISA

May 07, 2026

Vol. 0004

Hasil Kajian Cepat Terhadap Isu Strategis Kekinian

## The Reform Initiatives

Merupakan lembaga riset kebijakan yang bernaung di bawah PT Semesta Infomedia Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

TRI fokus pada penelitian kebijakan terkait Ekonomi, Fiskal, Kesejahteraan Sosial, Desentralisasi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Tata Kelola Kebijakan yang Baik, Politik & Elektoral, Penegakan Hukum, Ekonomi Digital, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).



**Dita Nurul Aini  
Mustika Dewi**

Economic Policy Specialist –  
The Reform Initiatives (TRI)

## Hilirisasi dan Pemerataan Ekonomi

*Hilirisasi ditekankan sebagai strategi prioritas dalam pembangunan Ekonomi nasional. Potensi yang besar untuk memperkuat nilai tambah komoditas yang berbasis sumber daya alam sekaligus mendorong pemerataan antardaerah, terutama pembangunan di luar Pulau Jawa. Secara nasional, rasio gini menurun dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,375 pada Maret 2025. Penurunan ini yang menggambarkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat mengalami perbaikan (BPS, 2025).*

Transformasi Hilirisasi di sektor pertambangan mineral, perkebunan melalui Kelapa Sawit, dan juga perikanan menghadirkan peluang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tumbuh cepat di pusat-pusat industri yang berada di Pulau Jawa, akan tetapi juga menyebar ke daerah luar Jawa dan pesisir. Nilai tambah investasi hilir bisa tetap terkonsentrasi di segelintir aktor besar dan tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat lokal, tanpa kebijakan pendukung yang inklusif. Hilirisasi yang inklusif menjadi penopang utama Indonesia menjadi negara maju di 2045.

Pemerintah mengarahkan hilirisasi sebagai instrumen untuk keluar dari jebakan ekspor bahan mentah dan memperkuat industrialisasi domestik. Kebijakan hilirisasi membuka ruang untuk pembangunan smelter dan pabrik pengolahan di berbagai wilayah. Rantai nilai dapat tercipta baik secara vertikal, maupun peningkatan kapasitas produksi lokal. Indonesia dapat meningkatkan margin keuntungan komoditas sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas melalui strategi hilirisasi.

Pendekatan nilai tambah menjadikan hilirisasi bukan hanya soal kuantitas ekspor, tetapi juga kualitas pertumbuhan ekonomi. Investasi pada sektor pengolahan akan menciptakan permintaan tenaga kerja terampil, memberikan peluang bagi pekerja lokal memperoleh upah lebih tinggi, transfer pengetahuan yang masif, serta tumbuhnya keterlibatan UMKM dalam rantai nilai sebagai mitra industri besar. Hilirisasi berpotensi memperbaiki distribusi pendapatan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, jika kebijakan kemitraan, transfer teknologi, dan pemberdayaan lokal diimplementasikan dengan baik.

Kebijakan hilirisasi Kelapa Sawit sangat relevan dalam konteks kompetisi global dan keberlanjutan. Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar dunia, Indonesia perlu memperkuat downstream menjadi oleofood, oleokimia, dan bioenergi agar nilai tambah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di dalam negeri (Lestari et al., 2025). Kebijakan perdagangan yang mendorong ekspor produk hilir sangat penting bagi Indonesia saat ini. Industri hilir sawit yang beragam berpotensi untuk berkembang secara cepat, berkelanjutan, serta menciptakan devisa lebih besar (Husin et al., 2024).

Transformasi hilirisasi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pengolahan kelapa sawit secara hilir perlu diimbangi oleh strategi ekonomi hijau agar dampak ekologis dapat dikurangi. Kebijakan hilirisasi berkelanjutan harus memastikan bahwa ekspansi pengolahan tidak merusak lingkungan dan sosial. Strategi ini menekankan hilirisasi sebagai pilar pembangunan jangka panjang, tidak hanya memperbesar ekonomi tetapi juga mempertahankan keberlanjutan ekosistem.

### **Hilirisasi dan Ketimpangan di Daerah**

Sulawesi Tengah memiliki pertumbuhan ekonomi luar biasa setelah menjadi pusat hilirisasi nikel. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB Provinsi Sulawesi Tengah bisa tumbuh 11,91% pada 2023, dan sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 25,53% pada tahun yang sama (BPS Sulawesi Tengah, 2024). Kenaikan ekspor barang dan jasa sebesar 18,92%, menunjukkan kapasitas lokal bukan hanya memasok pasar domestik, tetapi juga global. Hilirisasi nikel di wilayah ini telah menciptakan kluster industri yang menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat struktur ekonomi wilayah.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuka kesempatan pemerataan ekonomi melalui distribusi lapangan kerja dan pendapatan. Hilirisasi memberikan kesempatan bagi pekerja lokal untuk bekerja di sektor manufaktur dan pengolahan. Ketika sebagian nilai tambah dari smelter dapat diakses oleh tenaga kerja lokal dan UMKM pendukung, maka manfaat ekonomi dapat meluas, tidak hanya terkonsentrasi pada industri dengan modal besar. Multiplier efek dari hilirisasi bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Tantangan pemerataan tetap ada di wilayah sentra hilirisasi. Rasio gini Sulawesi Tengah pada Maret 2025 diangka 0,279, yang tetap menunjukkan adanya disparitas. Arus modal besar dan teknologi tinggi bisa saja menyisakan segmen masyarakat yang belum sepenuhnya menangkap manfaat hilirisasi. Diperlukan kebijakan kemitraan antara investor besar dan pelaku lokal, transfer teknologi yang lebih masif, dan pelatihan untuk memastikan partisipasi lokal di rantai nilai.

Dukungan dari pemerintah daerah juga sangat diperlukan untuk memperkuat sinergi kebijakan. Pemerintah Daerah berperan dalam menyediakan fasilitas bagi UMKM lokal agar mereka dapat masuk ke rantai nilai dan rantai pasok produk hilir. Skema pembiayaan, pelatihan vokasi, dan insentif untuk produksi lokal dapat memperkuat basis ekonomi masyarakat. Kebijakan yang bersifat melindungi lingkungan dan ekosistem sekitar juga diperlukan dari pemerintah daerah. Pengawasan dan pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas hilirisasi dapat dilakukan secara berkala. Jika intervensi ini berhasil, hilirisasi di Sulawesi Tengah dapat memicu perubahan struktural yang inklusif dan menurunkan ketimpangan jangka panjang.

### **Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Peluang Pemerataan di Wilayah Pesisir**

Wilayah pesisir memainkan peran signifikan dalam hilirisasi kelautan dan perikanan. Hilirisasi perikanan dapat membangun basis ekonomi lokal yang tangguh. Keterlibatan nelayan lokal dalam rantai pengolahan memberi peluang pendapatan yang lebih stabil dan juga pemerataan. Efektivitas pemerataan akan lebih tinggi jika kebijakan lokal mendukung akses pembiayaan mikro bagi nelayan dan pengusaha kecil di pesisir, serta pelatihan teknis pengolahan. Sumber daya lokal perlu diberdayakan agar nilai tambah dari hilirisasi tetap berada di komunitas pesisir dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh industri besar.

Hilirisasi sektor perikanan, misalnya pada komoditas tilapia memiliki potensi membentuk struktur ekonomi pesisir yang lebih merata. Industri pengolahan tilapia yang dekat dengan sentra budidaya memberikan peluang harga jual yang lebih adil kepada pembudidaya. Pembudidaya memperoleh posisi tawar yang lebih kuat karena industri lokal menyerap produksi secara berkelanjutan. Pabrik fillet menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir sehingga aktivitas ekonomi tidak lagi terpusat di kawasan perkotaan. Rantai nilai yang menyebar ke desa-desa pesisir memperkuat pemerataan karena manfaat ekonomi mengalir langsung kepada kelompok yang selama ini berada pada lapis bawah kegiatan perikanan.

Hilirisasi sektor kelautan seperti garam, akan berpotensi meningkatkan kualitas produk garam lokal. Adanya kebijakan hilirisasi garam nasional akan membuka pintu petani untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan mendapatkan harga yang stabil. Teknologi pengolahan yang modern memungkinkan wilayah pesisir memproduksi garam untuk kebutuhan industri makanan, sekaligus garam industri baik untuk industri kimia, farmasi, dan lain-lain. Petani garam mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi karena proses pemurnian dan pengemasan berlangsung di daerah produksi. Pemerintah daerah memperoleh dasar ekonomi baru untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik di kawasan pesisir. Aktivitas hilirisasi yang terbangun secara merata menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sehingga ketimpangan antarwilayah mengalami penurunan.

### **Hilirisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Saat ini pemerintah pusat telah mendorong penerapan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan untuk hilirisasi. Dukungan insentif fiskal dan non fiskal diberikan pada sektor-sektor hilirisasi. Promosi transformasi energi baru terbarukan dan himbauan praktik pertambangan ramah lingkungan (*good mining practice*) selalu digaungkan, meskipun belum dilakukan secara optimal. Pemerintah juga memberikan kemudahan perizinan bagi industri hilir, yang diimbangi dengan adanya penerapan prinsip ESG (*Environmental, Social and Governance*). Semua ini untuk dilakukan guna menjaga kelestarian alam sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal.

Agenda selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal melalui kontrak jangka panjang dan transfer teknologi agar manfaat hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh pemain besar. Pemerintah harus menyediakan sistem pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan regional, terutama di luar Jawa dan pesisir, agar daerah-daerah tersebut dapat membangun infrastruktur pendukung dan fasilitas pengolahan produk hilir. Kebijakan lingkungan harus diperketat dan dikombinasikan dengan insentif energi terbarukan agar hilirisasi mendukung transisi rendah karbon. Pusat pelatihan vokasi industri dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan menjembatani kesenjangan keterampilan. Perizinan dan pengawasan investasi perlu direformasi agar proses hilirisasi berjalan transparan, efisien, dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan adanya kebijakan hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Agenda selanjutnya, pemerintah perlu memperkuat kemitraan antara investor besar dan UMKM lokal melalui kontrak jangka panjang dan transfer teknologi agar manfaat hilirisasi tidak hanya dinikmati oleh pemain besar. Pemerintah harus menyediakan sistem pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan regional, terutama di luar Jawa dan pesisir, agar daerah-daerah tersebut dapat membangun infrastruktur pendukung dan fasilitas pengolahan produk hilir. Kebijakan lingkungan harus diperketat dan dikombinasikan dengan insentif energi terbarukan agar hilirisasi mendukung transisi rendah karbon. Pusat pelatihan vokasi industri dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal dan menjembatani kesenjangan keterampilan. Perizinan dan pengawasan investasi perlu direformasi agar proses hilirisasi berjalan transparan, efisien, dan berkelanjutan. Indonesia Emas 2045 akan tercapai dengan adanya kebijakan hilirisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

---

Associate Partner Publication

**BERITABARU.CO**  
— MELURUSKAN DISTORSI INFORMASI —

A summary of this article was published on **Beritabaruko**  
May 7, 2026.

<https://beritabaruko.com/hilirisasi-dan-pemerataan-ekonomi/>